

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Bimbingan Skripsi



UNIVERSITAS GALUH FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : Administrasi Publik (S1) Terakreditasi
Ilmu Pemerintahan (S1) Terakreditasi

Kampus : Jalan R.E. Martadinata No. 150 Hp. 0823 1749 2220 Ciamis 46274

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS GALUH

Nomor : 074/35/SK/AK/D/VII/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS GALUH

Nomor : 0572/35/SK/AK/D/XII/2025

TENTANG

PENGUKUHAN MAHASISWA PESERTA BIMBINGAN SKRIPSI DAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK FISIP UNIVERSITAS GALUH TAHUN AKADEMIK 2025/2026

- Menimbang** : DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP) UNIVERSITAS GALUH,
: bahwa sebagai syarat untuk menyelesaikan perkuliahan Program Pendidikan S-1 bagi mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh, diharuskan melakukan penulisan dan penyusunan Skripsi;
: bahwa untuk membantu dalam menyelesaikan proses penulisan dan penyusunan Skripsi dibutuhkan dosen pembimbing;
: bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh.
- Mengingat** : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
: Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
: Peraturan Rektor Universitas Galuh Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Pedoman Akademik Universitas Galuh Tahun 2025;
: Peraturan Rektor Universitas Galuh Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pembelajaran Project Based Learning (PBL) dan Case Based Method (CBM) Universitas Galuh;
: 7. Peraturan Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Statuta Universitas Galuh.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan**
Kesatu : Melakukan perubahan judul skripsi dari mahasiswa tersebut di bawah ini :
Nama : ZULVA NUGRAHA ALRIZKI
NIM : 3504220094
Dari semula berjudul :
"SINERGITAS KELEMBAGAAN DALAM MENANGGULANGI PERMASALAHAN LESBIAN GAY BISEKSUAL DAN TRANSGENDER DI KABUPATEN CIAMIS".
Menjadi berjudul :
"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETAHANAN KELUARGA DALAM MERESPON DINAMIKA SOSIAL DI KABUPATEN CIAMIS : Studi Tentang Penguatan Fungsi Keluarga Terhadap Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender"
- Kedua** : Dalam melakukan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibimbing oleh :
1. IMAM MAULANA YUSUF, S.I.P., M.Si. Sebagai Pembimbing I.
2. EET SAEFUL HIDAYAT, S.I.P., M.Si. Sebagai Pembimbing II.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2026.
- Keempat** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Ciamis
Pada tanggal : 28 Juli 2026
Dekan

H. Cecep Cahya Supena, S.H., M.H., M.Si.
NIDN. 0424117001

Lampiran 2 Surat Permohonan Izin Penelitian



UNIVERSITAS GALUH FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : Administrasi Publik (S1) Terakreditasi
Ilmu Pemerintahan (S1) Terakreditasi

Kampus : Jalan R.E. Martadinata No. 150 Hp. 0823 1749 2220 Ciamis 46274

Nomor : 240/35/SP/AK/DI/VII/2026
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Ciamis, 28 Juli 2026

Kepada
Yth, **Kepala Badan KESBANGPOL Kabupaten Ciamis**
di
Tempat

Bersama ini kami hadapkan, mahasiswa berikut ini :

Nama : Zulva Nugraha Alrizki
NIM : 3504220094
Tingkat : IV
Program Studi : Administrasi Publik

bermaksud akan mengadakan penelitian di **Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial Kabupaten Ciamis, Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis, MUI Kabupaten Ciamis, TP PKK Kabupaten Ciamis dan KPA Kabupaten Ciamis** mulai tanggal 28 Juli 2026 sampai dengan 30 Agustus 2026.

Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk memenuhi proses pembuatan Karya Ilmiah (Skripsi), dengan judul :

"Implementasi Kebijakan Ketahanan Keluarga Dalam Merespon Dinamika Sosial Di Kabupaten Ciamis : Studi Tentang Penguatan Fungsi Keluarga Terhadap Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender"

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon agar Bapak/Ibu dapat memberikan izin/rekomendasi demi kelancaran kegiatan termaksud.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :
1. Arsip

Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. R.A.A Kusumahsubrata No. 21 Kel. Kertasari Ciamis 46213
Telp. (0265) 771101 e-mail: kesbangpolciamis@gmail.com

Nomor : 000.9.2/1299-Bakesbangpol.01 Ciamis, 4 Agustus 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Yth. **DAFTAR TERLAMPIR**
di

T E M P A T

- I Memperhatikan : Surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Nomor : 240/35/SP/AK/DI/VII/2026 Tanggal 28 Juli 2026 Perihal Izin Penelitian.
- II Mengingat : 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
2 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
3 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

**MAKA SETELAH KAMI MENGADAKAN WAWANCARA LANGSUNG
DENGAN YANG BERSANGKUTAN PADA PRINSIPNYA KAMI TIDAK BERKEBERATAN DAN
BERSAMA INI KAMI HADAPKAN :**

Nama : ZULVA NUGRAHA ALRIZKI
NIDN/NIM/NIK : 3504220094
Pekerjaan : Mahasiswa/i
Alamat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh
Jln. R. E Martadinata No 150 Ciamis
Maksud : Melaksanakan Penelitian
Lokasi : TERLAMPIR
Judul : “ IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETAHANAN KELUARGA
DALAM MERESPON DINAMIKA SOSIAL DI KABUPATEN
CIAMIS : STUDI TENTANG PENGUATAN FUNGSI KELUARGA
TERHADAP FENOMENA LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN
TRANSGENDER “

Lamanya : 4 Agustus 2026 s.d 29 Oktober 2026

Penanggung Jawab : Hj. ETIH HENRIYANI, S.IP., M.Si

KETENTUAN-KETENTUAN YANG PERLU DITAATI :

- 1 Memperhatikan masalah ketertiban umum dan keamanan;
- 2 Tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan, sesuai prosedur/rencana yang ditetapkan;
- 3 Yang bersangkutan terlebih dahulu melapor kepada Kepala Wilayah/Instansi yang dikunjungi;
- 4 Setelah selesai melaksanakan kegiatan agar melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis;
- 5 Surat ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila kegiatan tersebut menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Ciamis
Pada tanggal 4 Agustus 2026
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN CIAMIS



Dr. R. YADI TISYADI, SE., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19680410 200112 1 003

Tembusan :

- Yth. : 1 Bupati Ciamis;
2 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat;
3 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Ciamis;
4 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ciamis;
5 Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh;
6 Yang bersangkutan.

Lampiran I Surat Kepala Bakesbangpol Ciamis
Nomor : 000.9.2/1299-Bakesbangpol.01
Tanggal : 4 Agustus 2026
Perihal : Surat Keterangan Penelitian

DAFTAR PENELITIAN YANG DITUJU

1. Kepala DPPKBPPA Kabupaten Ciamis;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis;
3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ciamis;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis;
5. Ketua PKK Kabupaten Ciamis
6. Ketua MUI Kabupaten Ciamis

Lampiran 4 Lembar Hasil Turnitin

Zulva Nugraha

Implementasi Kebijakan Ketahanan Keluarga Dalam Merespons Dinamika Sosial Di Kabupaten Ciamis: Studi Tenta...

 Quick Submit

 Quick Submit

 Universitas Galuh

Document Details

Submission ID trn:oid::13633561511	18 Pages
Submission Date Aug 26, 2026, 2:33 AM UTC	4,052 Words
Download Date Aug 26, 2026, 2:53 AM UTC	20,739 Characters
File Name Bab_1_-_ZULVA.doc	
File Size 359.5 KB	

 turnitin

Page 1 of 24 - Cover Page

Submission ID : trn:oid::13633561511

 turnitin

Page 2 of 24 - Integrity Overview

Submission ID : trn:oid::13633561511

12% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Exclusions

- 9 Excluded Matches

Top Sources

10%	 Internet sources
4%	 Publications
0%	 Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Lampiran 5 Pedoman Wawancara

Informan	Dimensi	Indikator	Pertanyaan Wawancara	Jawaban	Saran
Informan					
1 (Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Komunikasi	Sosialisasi	program ketahanan keluarga	Bagaimana kebijakan ketahanan keluarga disosialisasikan kepada masyarakat?	Pemerintah daerah menetapkan regulasi untuk bagaimana upaya membentuk ketahanan keluarga. Disosialisasikannya berjenjang termasuk di tingkat bawah ada kecamatan, desa, serta kelompok-kelompok masyarakat. Kita juga punya perangkat, walaupun itu perangkat dari pusat, tapi ikut mensosialisasikan di pemerintah kabupaten ciamis.
	Koordinasi	antar- OPD dan stakeholder	Bagaimana koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan kebijakan?	Tentu ada koordinatornya, koordinatornya antar lembaga, kalau meliputi perencanaan tentu ada badan perencanaan. Kalau teknik kegiatannya tentu ada di bidang PPA dan KB.	
	Konsistensi informasi	Bagaimana penyampaian informasi kepada keluarga sasaran?	Secara organisasi perangkat daerah ini ada perangkat yang melaksanakan teknis, ada yang melaksanakan administrasi. Tentu kalau menyangkut kesasaran ini informasi-informasi mengenai isu-isu keluarga ini tentu ada yang melibatkan teman-teman di tenaga teknis, misalnya kita di PLKB. Ada staf-staf UPTD, PPA juga dibantu oleh kader-kader terlatih		

	Kejelasan tujuan kebijakan	Apakah terdapat kendala komunikasi dalam implementasi kebijakan?	Ya tentu saja ada. Kendalanya dalam rangka penyampaian, siapa yang menyampaikan, terus sasaran penerima juga bisa terjadi kendala. Hal itulah alamiah.	
Sumber	Daya	Kompetensi SDM pelaksana	Bagaimana kompetensi pelaksana?	Penyuluh keluarga berencana ini adalah tenaga- tenaga profesional. Sudah tentu kompetensinya bisa dipertanggungjawabkan
	Ketersediaan anggaran	Bagaimana dukungan anggaran?	Dukungan anggaran operasional ada dari BOK Pusat	
	Sarana	dan prasarana	Apakah sarana prasarana memadai?	Untuk sarana-persarana di kecamatan kita ada 27 balai, balai tempat penyeluruhan. Di samping itu juga ada penyeluruhan- penyeluruhan KIE di keluarga dan di kelompok-kelompok. Saya kira cukup ya.

	Informasi dan data pendukung	Bagaimana ketersediaan data dan informasi?	Bagaimana ketersediaan data keluarga ada di SIGA, di Tim Informasi Keluarga. Punyanya kementerian
	Kewenangan pelaksana	Apakah kewenangan pelaksana sudah jelas?	Sudah jelas. Jadi mereka punya perjanjian kinerja ya, antara kader dengan tenaga-tenaga penyuluh di lapangan.
Disposisi	Komitmen pelaksana	Bagaimana komitmen	Ya, mereka punya perjanjian kerja yang mengikat.

	pelaksana terhadap program?		
	Responsivitas terhadap kebijakan	Bagaimana sikap pelaksana ketika menghadapi berbagai dinamika sosial?	Mereka itu kan profesional, artinya profesional itu ada tiga kompetensi yang melekat pada dirinya. Kompetensi manajerial, kompetensi teknik, dan kompetensi sosio-kultur, ya sudah jelas ini melekatnya.
	Integritas aparaturnya	Bagaimana bentuk tanggung jawab pelaksana?	Sebagaimana ASN pada umumnya mereka melakukan di awal tahun membuat SKP ya. Membuat rencana hasil kerja, membuat rencana aksi. dan mengupload harian kerja.
	Dukungan terhadap tujuan kebijakan	Bagaimana bentuk inovasi pelaksanaan program?	Bentuk inovasi pelaksanaan program dalam artian kita mengartikan inovasi itu menekala dari target yang kita tetapkan ada kesenjangan, ada capaiannya tidak terpenuhi. Silahkan ya inovasi yang kita kembangkan sekecil mungkin dari ranah yang paling kecil, dari ranah teknis dulu ya. Nah inovasi-inovasi itu tentu banyak terjadi di desa, bisa di balai, yang namanya inovasi untuk administrasi, saya kira cukup jarang di kita.
Struktur Birokrasi	Pembagian tugas	Bagaimana pembagian tugas antarinstansi?	Pembagian tugas antarinstansi tentu hanya di koordinir ya. baik oleh benda di tingkat perencanaan maupun oleh kita di tingkat teknik kegiatan. Dimulai dari penjabaran dari perda.
	Koordinasi lintas sektor	Bagaimana mekanisme koordinasi?	Mekanisme koordinasi tentu ada kegiatan- kegiatan rapat koordinasi. Dari mulai

		merencanakan, memonitoring, dan melihat hasil.		
	SOP pelaksanaan program	Apakah terdapat SOP pelaksanaan program?	Ya ada SOP pelaksanaannya.	
	Mekanisme monitoring dan evaluasi	Bagaimana mekanisme monitoring		

dan
evaluasi?|Mekanismenya rapat, berkumpul,
secara
periodik||
|Informan
2
(Dinas
Pengendalian
Penduduk
Keluarga
Beren
cana
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Perlindungan
An
ak)
Komunikasi|Sosialisasi program
ketahanan
keluarga|Bagaimana
kebijakan
ketahanan
keluarga
disosialisasikan
kepada masyarakat?|Kebijakan
ketahanan keluarga di
lingkup
DPPKBPPPA
di
sosialisasikan
kepada
masy
arakat melalui berbagai strategi
yang
melibatkan
Penyuluh
Keluarga
Berencana/Penyul
uh
Lapangan
Keluarga
Berencana (PKB/PLKB), Kader
serta mitra
kerja di tingkat Desa dan Kecamatan.|Kepala
Bidang
Keluarga
Berencana,
Ketahanan
dan
Kesejahteraan
Keluarga|
||Koordinasi antar-
OPD
dan
stakeholder|Bagaimana
koordinasi
antarinstansi
dalam
pelaksanaan
kebijakan?|Koordinasi antarinstansi
dalam pelaksanaan
kebijakan ketahanan keluarga di
Kabupaten
Ciamis dilaksanakan secara terpadu
sesuai
dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten
Ciamis
Nomor 10 Tahun 2025 tentang
Ketahanan Keluarga. Pelaksanaan
kebijakan
ini tidak hanya menjadi tanggung
jawab
DPPKBPPPA,tetapi melibatkan berbagai||

|||perangkat
daerah,
seperti
dinas
yang
membida
ngi kesehatan, pendidikan, sosial,
pemberdayaan masyarakat
dan desa, serta
instansi vertikal, pemerintah
kecamatan,
pemerintah desa, organisasi
kemasyarakatan,
dan lembaga keagamaan sesuai dengan
tugas
dan
fungsi
masing-
masing.
Koordinasi
dilakukan melalui forum koordinasi,
rapat
lintas sektor,, pelaksanaan program bersama,
serta
monitoringdan evaluasi secara berkala|

|---|---|---|

|Kejelasan

tujuan
kebijakan|Bagaimana
penyampaian
informasi
kepada
keluarga sasaran?|Penyampaian informasi dilakukan
secara
langsung. Penyampaian secara langsung
dilakukan
oleh PKB/PLKB bersama
dengan
Kader
melalui
kegiatan
penyuluhan,
kunju
ngan rumah, pemberinaan Kelompok
Kegiatan BKB (Bina
Keluarga Balita),
BKR
(Bina
Keluarga
Remaja),
BKL
(Bina
Kelu
arga
Lansia),
UPPKA
(
Usaha
Peningkatan
Pendapatan Keluarga Akseptor),
dan PIK-R (Pusat Informasi
dan Konseling
Remaja).|

|Konsistensi
informasi|Apakah terdapat
kendala
komunikasi
dalam implementasi
kebijakan?|Kendala yang
sering dihadapi antara lain
masih adanya perbedaan tingkat

pemahaman masyarakat terhadap pentingnya
ketahanan keluarga, keterbatasan akses informasi pada

||| wilayah atau kelompok tertentu, serta rendahnya
partisipasi sebagian keluarga dalam kegiatan pembinaan.
Selain itu, penyampaian informasi terkadang belum dapat
menjangkau seluruh sasaran secara bersamaan karena
keterbatasan sumber daya dan jadwal kegiatan di lapangan.
dalam kegiatan pembinaan. Selain itu,
penyampaian informasi terkadang belum dapat
menjangkau seluruh sasaran secara bersamaan
karena keterbatasan sumber daya dan jadwal kegiatan di
lapangan. |

|---|---|---|---|

| Sumber Daya | Kompetensi
SDM pelaksana | Bagaimana kompetensi pelaksana? | Para
> pelaksana, baik di lingkungan DPPKBPPPA maupun

 PKB/PLKB di lapangan, memiliki pemahaman yang
baik mengenai program Bangga Kencana, pembangun
an keluarga, serta pelaksanaan program ketahanan keluarga
sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selain itu, mereka
secara berkala mengikuti berbagai kegiatan peningkatan
kapasitas, seperti pendidikan
dan pelatihan, bimbingan teknis, orientasi, wor
kshop, serta rapat koordinasi
yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pem
erintah provinsi, maupun pemerintah |

||| daerah. |

|---|---|---|

| Ketersediaan anggaran | Bagaimana dukungan anggaran? | D
ukungan anggaran Program
Ketahanan Keluarga berasal dari DAK (Kemendukba
ngga/BKKBN) dan DAU (APBD) yang dituangkan melalui
pembiayaan anggaran kegiatan yang berhubungan
dengan Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga |

| Sarana dan prasarana | Apakah
sarana prasarana memadai? | DPPKBPPPA memiliki fasilitas
pendukung seperti ruang pertemuan, perangkat ad
ministrasi, serta sarana operasional yang digunakan dalam
pelaksanaan pembinaan dan koordinasi. Dan di Kabupaten
Ciamis terdapat Balai Penyuluhan KB yang tersedia di
setiap

Kecamatan. Dan DPPKBPPPA memiliki wadah (kelomp
ok) untuk meningkatkan Program Ketahanan Keluarga yaitu
BKB, BKR, BKL, UPPKA dan PIK-R. |

| Informasi dan data pendukung | Bagaimana ketersediaan
data dan informasi? | Data diperoleh dari berbagai sumber
secara online maupun manual yaitu hasil
pendataan keluarga, laporan PKB/PLKB dan pemanfaata

na
Aplikasi
SIGA
(Sistem
Informasi Keluarga) yang
di Kelola langsung
oleh Kemendukbangga/BKKBN|

||Kewenangan
pelaksana|Apakah
kewenangan
pelaksana
sudah
jelas?|Dalam pelaksanaan kebijakan
ketahanan
keluarga, Dinas PPKBPPPA Kabupaten
Ciamis
melaksanakan tugas sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya,
sedangkan
PKB/PLKB berperan dalam
penyuluhan,
pendampingan, pembinaan, serta pelaporan
di
tingkat Kecamatan.|

|---|---|---|---|

|Struktur
Birokrasi|Pembagian tugas|Bagaimana
pembagian
tugas
antarinstansi?|Setiap instansi memiliki peran sesuai
dengan
bidang
kewenangannya,
seperti
Dinas
PPKB
PPPA dalam pembinaan ketahanan
keluarga, Dinas Kesehatan
pada aspek
kesehatan, serta pemerintah kecamatan
dan
desa dalam mendukung pelaksanaan program
di
wilayahnya. Pembagian tugas tersebut
dilaksanakan melalui
koordinasi lintas sektor,
sehingga pelaksanaan kebijakan
berjalan
secara terpadu, saling mendukung,
dan
menghindari tumpangtindih kewenangan.|

||Koordinasi

lintas
sektor|Bagaimana
mekanisme
koordinasi?|Dilaksa
nakan melalui rapat koordinasi antar
instansi|

||SOP pelaksanaan
program|Apakah terdapat
SOP
pelaksanaan
program?|SOP mengacu pada ketentuan yang
di
tetapkan oleh Kementerian Kependudukan
dan
Pembangunan
Keluarga/BKKBN
serta
Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku,
dan dalam pelaksanaannya di
sesuaikan|

||||dengan kebijakan daerah yaitu Pertauran
Daerah
Kabupaten Caimis Nomor 10 Tahun
2025 tentang
Penyelenggaraan Ketahanan
Keluarga||

|---|---|---|---|

||Mekanisme
monitoring

dan
evaluasi|Bagaimana
mekanisme
monitoring

dan
evaluasi?|Monitoring dilakukan melalui
pemantauan
pelaksanaan kegiatan serta
pengumpulan
laporan dari tingkat desa, kecamatan,
hingga
kabupaten. Evaluasi dilaksanakan melalui
rapat
evaluasi, analisis capaian indikator
program, serta
pemanfaatan data dari SIGA
(Sistem Informasi Keluarga) dan
laporan
kegiatan sebagai dasar penilaian kinerja||

|Informan 3
(Dinas
Kesehatan)
Komunikasi|Sosialisasi
program
ketahanan

keluarga|Bagaimana
kebijakan
ketahanan

keluarga
disosialisasikan
kepada masyarakat?|Untuk
sosialisasi lebih banyak di dinas
pengendalian penduduk
keluarga berencana
pemberdayaan perempuan dan

perlindungan
anak yang melaksanakan. Kita lebih terfokus di
bidang kesehatannya.|Penanggung
Jawab Program
KIA Bidang
Kesehatan
Masyarakat A|
||Koordinasi antar-
OPD dan
stakeholder|Bagaimana
koordinasi
antarinstansi dalam
pelaksanaan
kebijakan?|Sudah berjalan dengan beberapa rapat
koordinasi||
||Kejelasan tujuan
kebijakan|Bagaimana
penyampaian
informasi kepada
keluarga sasaran?|Penyampaian informasi dilakukan di sekolah
dengan sasaran anak usia sekolah dan remaja.
Di posyandu remaja dengan sasaran anak usia
remaja dan anak sekolah yang tidak di sekolah
formal. Di masyarakat dengan waktu sasaran
rapat mingguan desa, pengajian, posyandu.||

||Konsistensi
informasi|Apakah terdapat
kendala komunikasi
dalam implementasi
kebijakan?|Kendalanya kesehatan reproduksi sebagai salah
satu contohnya masih dianggap tabu oleh
sebagian masyarakat terutama kalangan orang
tua.||

|---|---|---|---|---|
|Fungsi
Reproduksi|Penyuluhan
kesehatan
reproduksi dan
kehidupan
berkeluarga|Bagaimana edukasi
kesehatan
reproduksi
diberikan?|Melalui petugas di Puskesmas melakukan
edukasi tentang kesehatan reproduksi di
sekolah dengan sasaran anak usia
sekolah/remaja dan melakukan penyuluhan di
posyandu, di desa, acara keagamaan dengan
sasaran masyarakat.||

|Informan 4
(Dinas Sosial)
Komunikasi|Sosialisasi program
ketahanan keluarga|Bagaimana
kebijakan
ketahanan keluarga
disosialisasikan
kepada masyarakat?|Kebijakan dilakukan melalui edukasi, asesmen,
pendampingan, dan pemberian dukungan
kepada keluarga sesuai dengan permasalahan
yang dihadapi. Salah satunya melalui program
untuk membantu mengembalikan fungsi sosial
keluarga.|Operator
Layanan
Operasional
Direktorat
Rehabilitasi
Sosial Korban
Penyalahgunaan
NAPZA dan
ODHIV
Kementerian
Sosial RI|

||Koordinasi antar-
OPD dan
stakeholder|Bagaimana
koordinasi
antarinstansi dalam
pelaksanaan
kebijakan?|Dinas Sosial melakukan koordinasi dengan
Dinas KB, Dinas Kesehatan, serta pihak atau
komunitas terkait. Koordinasi dilakukan sesuai
dengan bidang dan jenis permasalahan yang
ditangani.||

||Kejelasan tujuan
kebijakan|Bagaimana
penyampaian|Informasi disampaikan secara bertahap dengan
memperhatikan kondisi,

kesiapan, persetujuan,
dan privasi keluarga. Dalam kondisi tertentu,||

|||informasi kepada
keluarga sasaran?|Dinas Sosial bekerja sama dengan komunitas
atau pendamping yang sudah dipercaya oleh
kelompok sasaran.||

|---|---|---|---|---|

||Konsistensi
informasi|Apakah terdapat
kendala komunikasi
dalam implementasi
kebijakan?|Kendalanya antara lain sulitnya memperoleh
data, menjaga kerahasiaan informasi,
keterbatasan akses terhadap kelompok sasaran,
serta adanya keluarga yang belum mengetahui
atau belum siap menerima informasi mengenai
kondisi anggota keluarganya.||

|Fungsi
Perlindungan|Pencegahan
kekerasan|Bagaimana
perlindungan
terhadap anak dan
anggota keluarga?|Perlindungan dilakukan melalui edukasi,
pendampingan, dan penguatan fungsi sosial
keluarga. Pendekatan tidak hanya diberikan
kepada individu yang mengalami masalah,
tetapi juga kepada keluarga sebagai lingkungan
pendukung.||

||Perlindungan anak|Bagaimana
perlindungan
terhadap anak dan
anggota keluarga?|alah satu programnya adalah yang meliputi
asesmen, edukasi, pendampingan, dukungan
sosial dan spiritual, serta pemberdayaan
melalui kewirausahaan sesuai kebutuhan
penerima layanan.||

||Pendampingan
keluarga|Program apa yang
mendukung
perlindungan
keluarga?|Penanganan dilakukan berdasarkan kondisi dan
akar permasalahan setiap keluarga. Dinas
Sosial melakukan asesmen, edukasi,
pendampingan, serta berkoordinasi dengan
bidang atau instansi terkait agar keluarga dapat
kembali menjalankan fungsi sosialnya.||

|Informan 5
(Dinas
Pendidikan)
Komunikasi|Sosialisasi program
ketahanan keluarga|Bagaimana
penanganan apabila
terjadi|Sosialisasi khusus tidak ada, tetapi disampaikan
melalui rapat koordinasi setiap bulan. Dinas|Kepala Seksi
Peserta Didik
dan|

|||permasalahan
keluarga?|Pendidikan juga mendukung kegiatan parenting
melalui surat edaran dan media sosial.|Pembangunan
Karakter SD
Bidang
Pembinaan SD|

|---|---|---|---|---|

||Koordinasi antar-
OPD dan
stakeholder|Bagaimana
koordinasi
antarinstansi dalam
pelaksanaan
kebijakan?|oordinasi dilakukan melalui Satgas PPKSP
yang melibatkan Dinas Pendidikan, Dinas KB,
dan Dinas Kesehatan. Jika terdapat
permasalahan, penanganannya disesuaikan,
seperti masalah fisik dirujuk ke

Dinas
Kesehatan dan masalah mental
dikoordinasikan
dengan PPA.||

||Kejelasan

tujuan
kebijakan|Bagaimana
penyampaian
informasi
kepada
keluarga sasaran?|Informasi disampaikan secara
berjenjang
melalui koordinator wilayah, pengawas,
dan
K3S, kemudian diteruskan ke sekolah masing-
masing.
Dinas juga menggunakan platform
monitoring karakter.||

||Konsistensi
informasi|Apakah terdapat
kendala
komunikasi
dalam implementasi
kebijakan?|Kendalanya
terutama faktor geografis karena
terdapat 744 SD dengan
wilayah yang luas.
Selain itu, beberapa program belum
terintegrasi
secara optimal.||

|Fungsi
Sosialisasi

dan
Pendidikan|Parenting|Bagaimana
keluarga
diberikan
pendidikan
mengenai
pengasuhan?|Dinas
Pendidikan menindaklanjuti melalui
surat edaran, sedangkan
sekolah
mengembangkan bentuk pengasuhan masing-
masing,
seperti kegiatan parenting, pengajian,
dan pertemuan antara
orang tua dengan
sekolah.||

||Pendidikan
karakter|Bagaimana
keluarga
diberikan
pendidikan|Pembentukan karakter dilakukan
melalui
pengembangan minat dan bakat,
kegiatan
ekstrakurikuler, kokurikuler, pembelajaran||

||||mengenai
pengasuhan?|berbasis proyek, serta berbagai
inovasi di
satuan pendidikan.||

|---|---|---|---|---|---|

|||Pembinaan remaja|Bagaimana
keluarga
diberikan
pendidikan
mengenai
pengasuhan?|Kolaborasi
dilakukan melalui kegiatan
parenting dan pelibatan orang
tua dalam
berbagai||

|Informan

6
(MUI
Kabupaten
Ciamis)|Fungsi
Keagamaan|Program
pembinaan
keluarga|Bagaimana
pembentukan
karakter
anak
dilakukan?|MUI lebih banyak memberikan
imbauan
kepada para dai agar menyampaikan
kewajiban
orang tua terhadap anak, terutama
dalam
memberikan pendidikan agama sejak dini.
Anak perlu
ditanamkan rasa iman kepada Allah
sejak kecil, serta
diberikan cinta kepada Allah,
cinta kepada Rasul, dan cinta
kepada keluarga.
Selain itu, penguatan keluarga
dilakukan
melalui kerja sama dengan pemerintah
daerah
untuk melakukan penjagaan, pencegahan,
dan
pembinaan.|Ketua MUI
Kabupaten
Ciamis|

|||kerja sama dengan
tokoh agama|Apa bentuk
kolaborasi
sekolah
dan keluarga|Tokoh agama, khususnya para kiai dan
dai,
berperan memberikan pemahaman keagamaan
kepada
masyarakat dan keluarga. Mereka
mengingatnkan kewajiban
orang tua dalam
mendidik anak serta pentingnya
memperkuat
keimanan dan kedekatan dalam keluarga.
MUI
juga melakukan kerja sama dengan pemerintah,
bidang

kesehatan, sosial, hukum, dan
kepolisian karena permasalahan tersebut tidak
dapat ditangani sendiri.||

|||penyuluhan agama|Bagaimana respons
masyarakat
terhadap program
tersebut?|Respons masyarakat pada umumnya
menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap
perkembangan permasalahan yang berkaitan||

|---|---|---|---|---|---|

|Informan 7
(TP

PKK
Kabupaten
Ciamis)|Komunikasi|Sosialisasi

program
ketahanan

keluarga|Bagaimana
kebijakan
ketahanan

keluarga
disosialisasikan
kepada masyarakat?|Kebijakan ketahanan keluarga disosialisasikan
melalui kolaborasi antara PKK dengan berbagai
dinas atau lembaga terkait. PKK memiliki
jaringan kader yang berjenjang dari tingkat
pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa,
hingga dasawisma sehingga informasi dan
program dapat disampaikan sampai ke
masyarakat. Dalam pelaksanaannya, PKK juga
bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, Dinas
KB, Dinas Kesehatan, serta tokoh masyarakat
dan tokoh agama. Salah satu bentuknya adalah
sosialisasi mengenai perlindungan anak,
kekerasan seksual, kekerasan digital, dan
berbagai program ketahanan keluarga melalui
kader PKK di lapangan.|Sekretaris PKK
Kabupaten
Ciamis|

|||Koordinasi antar-
OPD

dan
stakeholder|Bagaimana
koordinasi
antarinstansi dalam
pelaksanaan
kebijakan?|Koordinasi antarinstansi berjalan dengan baik.
Banyak program PKK yang berkaitan dengan
dinas atau lembaga lain. Dari sekitar 27 OPD di
Kabupaten Ciamis, sekitar 13 OPD
memiliki keterkaitan dengan pekerjaan PKK.
Misalnya, PKK berkolaborasi dengan Dinas
KB dalam program Kampung KB dan kegiatan
sosialisasi, dengan Dinas Pendidikan dalam
memberikan edukasi kepada anak-anak SMP,
serta dengan Dinas Kependudukan dan||

||||Pencatatan Sipil dalam pelayanan administrasi
kependudukan.|

|---|---|---|---|

||Kejelasan

tujuan
kebijakan|Bagaimana
penyampaian
informasi kepada
keluarga sasaran?|Informasi disampaikan melalui kader-kader
PKK yang berada di lapangan, termasuk kader
BKB, BKL, dan kelompok lainnya. Karena
kader tersebut juga berada dalam struktur PKK,
informasi dapat disampaikan secara berjenjang
sampai tingkat masyarakat. Selain melalui
kader, penyampaian informasi juga dilakukan
melalui kegiatan pengajian, kunjungan

atau
pembinaan wilayah, serta kegiatan bersama
dinas terkait.|

||Konsistensi
informasi|Apakah terdapat
kendala komunikasi
dalam implementasi
kebijakan?|Ada beberapa kendala, terutama berkaitan
dengan sumber daya manusia di lapangan yang
belum merata. Jumlah kader yang tersedia
terkadang belum sesuai dengan kebutuhan
ideal. Selain itu, tingkat pendidikan dan
kemampuan kader juga tidak sama. Karena
sebagian besar kader bekerja berdasarkan
kerelawanan, tidak semua orang mudah untuk
berkomitmen dan bersedia berkorban dalam
menjalankan tugas.|

|Disposisi|Komitmen
pelaksana|Bagaimana
komitmen
pelaksana terhadap
program?|Pelaksana menunjukkan komitmen untuk tetap
menjalankan program yang telah diamanatkan
pemerintah, khususnya program yang berkaitan
dengan ketahanan keluarga. Walaupun
beberapa program PKK, terutama Pokja I, tidak
selalu dianggap populer dibandingkan kegiatan
PKK yang berkaitan dengan memasak atau|

|||kerajinan, pengurus tetap berusaha
menjalankan program tersebut. PKK juga
berusaha menciptakan inovasi agar program
dapat terus berjalan dan diterima masyarakat.|

|---|---|---|

|Responsivitas
terhadap kebijakan|Bagaimana sikap
pelaksana ketika
menghadapi
berbagai dinamika
sosial?|Pelaksana berusaha menyesuaikan program
dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.
Ketika terdapat persoalan di lapangan, PKK
tidak hanya menjalankan program secara rutin,
tetapi juga melakukan inovasi dan bekerja sama
dengan pihak lain. Contohnya adalah kegiatan
yang melibatkan kader dalam pelayanan
administrasi kependudukan serta sosialisasi
mengenai kekerasan seksual dan perlindungan
anak.|

|Integritas aparat|Bagaimana bentuk
tanggung jawab
pelaksana?|Tanggung jawab dilakukan melalui keterlibatan
langsung kader dalam menyampaikan
informasi dan menjalankan program sampai ke
masyarakat. Kader di tingkat bawah menjadi
penggerak kegiatan, sedangkan pengurus PKK
melakukan pembinaan dan koordinasi secara
berjenjang. Dengan demikian, pelaksanaan
program tidak hanya berhenti di tingkat
kabupaten, tetapi diteruskan sampai desa dan
dasawisma.|

|Dukungan terhadap
tujuan kebijakan|Bagaimana bentuk
inovasi pelaksanaan
program?|Inovasi dilakukan dengan menyesuaikan
program dengan kondisi masing-masing
daerah. Setiap kecamatan atau desa dapat
memiliki inovasi yang berbeda. Contohnya
adalah kegiatan pelayanan administrasi|

||||kependudukan melalui kolaborasi dengan
Disdukcapil, kegiatan keagamaan di tingkat
masyarakat, serta pembinaan remaja melalui
Genre dan PIK-R.|

|---|---|---|---|

|Fungsi
Keagamaan|Penyuluhan agama|Program apa yang
dilakukan untuk
memperkuat fungsi
keagamaan
keluarga?|Program penguatan keagamaan dilakukan
melalui berbagai kegiatan, baik di tingkat
pengurus maupun masyarakat. Di tingkat
pengurus terdapat kegiatan pengajian atau
kegiatan keagamaan secara bergiliran. Di
masyarakat terdapat pengajian yang melibatkan
kader, kegiatan Jumat Berkah bagi remaja,
kegiatan membersihkan masjid, serta Satgas
Jumat di beberapa daerah. Selain itu, dalam
kegiatan pengajian, kader juga diarahkan untuk
menyisipkan materi mengenai program PKK,
seperti perlindungan anak, pencegahan
kekerasan seksual, narkoba, dan berbagai
persoalan sosial lainnya.|

||Kerja sama dengan
tokoh agama|Bagaimana peran
tokoh agama?|Tokoh agama memiliki peran yang cukup baik
dan terlibat dalam kegiatan PKK di
masyarakat. Ketika PKK melakukan
pembinaan wilayah, tokoh agama turut hadir
untuk berdiskusi dan membahas keresahan
yang dihadapi masyarakat. Tokoh agama juga
dapat membantu menyampaikan materi
program PKK melalui pengajian sehingga
pesan yang disampaikan menjadi lebih mudah
diterima masyarakat.|

||Program
pembinaan
keluarga|Bagaimana respons
masyarakat
terhadap program
tersebut?|Respons masyarakat terhadap program
keagamaan pada umumnya cukup baik.
Masyarakat masih antusias mengikuti berbagai
kegiatan keagamaan dan kegiatan positif yang
melibatkan anak serta remaja. Namun, terdapat
tantangan dari pengaruh lingkungan dan
perkembangan teknologi, terutama penggunaan
gadget dan konten digital. Oleh karena itu,
PKK berusaha memperkuat nilai-nilai positif
melalui kegiatan keagamaan dan kegiatan
remaja.|

|---|---|---|---|

|Fungsi Sosial
Budaya|Pembinaan nilai
sosial|Bagaimana
pemerintah
memperkuat nilai
sosial budaya
dalam keluarga?|Penguatan nilai sosial budaya dilakukan
melalui berbagai kegiatan masyarakat yang
melibatkan kader PKK. Salah satu bentuknya
adalah penyampaian pesan melalui kegiatan
yang menggunakan lagu, nada, dan gerakan.
Selain itu, PKK juga terlibat dalam berbagai
kegiatan masyarakat dan mendorong
masyarakat untuk mempertahankan kegiatan
yang mengandung nilai kebersamaan serta
gotong royong.|

||Kegiatan
masyarakat|Bagaimana
partisipasi
masyaraka
t?|Partisipasi masyarakat cukup beragam dan pada
beberapa
daerah tergolong tinggi. Masyarakat
akan lebih aktif ketika
melihat manfaat nyata
dari program yang dilaksanakan.
Pemerintah
desa dan masyarakat yang responsif
membuat
pembinaan PKK menjadi lebih mudah dan
mendorong
kader untuk semakin bersemangat
dalam menjalankan program.|

||Pelestarian budaya
lokal|Apa kendala
yang
dihadapi?|Salah satu kendalanya adalah masih
adanya
masyarakat yang pada awalnya skeptis
terhadap
program PKK atau menganggap program
sebagai
beban. Selain itu, keberhasilan kegiatan
PKK sering kali
tidak terlihat secara fisik
sehingga kurang mendapatkan
perhatian
dibandingkan pembangunan fisik seperti
jalan
atau jembatan. Meskipun demikian,
setelah
masyarakat melihat hasil dan manfaat
program,
penerimaan terhadap kegiatan PKK
biasanya
menjadi lebih baik.|

|---|---|---|---|

|Fungsi Ekonomi|Pemberdayaan
ekonomi
keluarga|Bagaimana
pemberdayaan
ekonomi
keluarga
dilakukan?|Pemberdayaan ekonomi dilakukan
melalui
program UP2K atau Usaha Peningkatan
Pendapatan
Keluarga. Program tersebut
memberikan modal bergulir kepada
kelompok
masyarakat. Modal yang diberikan relatif
kecil
karena diarahkan untuk usaha mikro dan
kecil.
Usaha yang didukung antara lain warung,
penjualan
sayur, makanan, keripik, usaha
gorengan, maupun kebutuhan
usaha lainnya.
PKK juga memiliki koperasi di
beberapa
wilayah.|

||Pelatihan usaha|Apakah ada
pelatihan usaha?|Ada.
Pelatihan dilakukan melalui kerja sama
dengan berbagai
dinas. Pelatihan meliputi
teknik pembuatan makanan atau
roti,
pengemasan produk, pengembangan produk,
serta
aspek lain yang mendukung peningkatan
kapasitas usaha
masyarakat.|

||Fungsi
Pembinaan
Lingkungan|Kegiatan
lingkungan|Bag
aimana
lingkungan
mendukung
ketahanan
keluarga?|Li
ngkungan yang bersih dan sehat mendukung
ketahanan keluarga
karena kesehatan anggota
keluarga merupakan salah satu
bagian penting
dari keluarga yang kuat.
Kebersihan
lingkungan juga berkaitan dengan
pencegahan
stunting, karena salah satu faktor
yang
berhubungan dengan stunting adalah sanitasi.
Oleh
karena itu, PKK mendorong kegiatan
kebersihan lingkungan
seperti Jumat Bersih
dan kegiatan bersih-bersih di
lingkungan
masyarakat maupun masjid.||

|---|---|---|---|---|

|||Partisipasi
masyarakat|Apa bentuk
partisipasi
masyarakat?|Partisipasi masyarakat diwujudkan melalui
kegiatan gotong royong dan kebersihan
lingkungan. Jadwal kegiatan biasanya
disepakati bersama di tingkat desa atau
masyarakat. Kader PKK juga berperan dalam
menggerakkan masyarakat, termasuk mengajak
masyarakat untuk menjaga kebersihan
lingkungan dan fasilitas umum seperti masjid.||

|||Pembinaan sosial|Bagaimana sinergi
pemerintah dan
masyarakat?|Sinergi dilakukan melalui kerja sama dalam
menentukan dan melaksanakan kegiatan di
tingkat desa. Pemerintah desa dan masyarakat
saling mendukung dalam pelaksanaan program.
Respons pemerintah||

|Informan
8
(Dinas
Pengendalian
Penduduk
Keluarga|Komunikasi|Sosialisasi program
ketahanan keluarga|Bagaimana
kebijakan
ketahanan keluarga
disosialisasikan
kepada masyarakat?|Penyampaian program dilakukan melalui
koordinasi di tingkat kecamatan dan desa,
kemudian diteruskan melalui kader
PPKBD/IMP dan pertemuan kelompok.
Penyampaian juga dilakukan melalui kelompok|Penyuluh
Keluarga
Berencana|

|Berencana
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Perlindungan
Anak)|||Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga
Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL),
serta Forum Informasi dan Konseling Remaja
(PIK-R). Selain pertemuan langsung, penyuluh
juga memanfaatkan media sosial dan
WhatsApp Group untuk mengoptimalkan
komunikasi dengan masyarakat.|

|---|---|---|---|

||Koordinasi antar-
OPD dan
stakeholder|Bagaimana
koordinasi
antarinstansi dalam
pelaksanaan
kebijakan?|Koordinasi antarinstansi di Kabupaten Ciamis
sudah cukup baik. Di tingkat kabupaten
terdapat B2KB dan OPD terkait, kemudian di
tingkat kecamatan terdapat UPTD serta
pimpinan kecamatan lainnya. Koordinasi
dilakukan melalui kegiatan dan momentum
program. Di tingkat kecamatan juga
dilaksanakan rakor setiap bulan yang
melibatkan UPTD, kecamatan, puskesmas,
KUA, koordinator pendidikan, PPL PKH dan
pihak lainnya.|

||Kejelasan tujuan
kebijakan|Bagaimana
penyampaian
informasi kepada
keluarga sasaran?|Informasi disampaikan secara berjenjang, mulai
dari koordinasi di tingkat kecamatan, desa,
kader PPKBD/IMP, hingga pertemuan
kelompok keluarga. Kelompok sasaran meliputi
keluarga yang memiliki balita melalui BKB,
keluarga yang memiliki remaja melalui BKR,
keluarga yang memiliki lansia melalui BKL,
serta

remaja melalui PIK-R. Kelompok-
kelompok tersebut sudah terbentuk di desa-
desa sehingga penyampaian informasi|

||||dirasakan cukup menyeluruh, walaupun belum
optimal 100 persen|

|---|---|---|---|

||Konsistensi
informasi|Apakah terdapat
kendala komunikasi
dalam implementasi
kebijakan?|Ada. Kendala utamanya adalah beban kerja
penyuluh yang cukup banyak karena masing-
masing petugas membina lebih dari dua desa.
Kondisi tersebut menyulitkan mobilisasi dan
penyampaian program secara detail. Menurut
responden, apabila seorang petugas hanya
memegang satu atau maksimal dua desa
binaan, pelaksanaan program akan lebih
maksimal.|

|Sumber Daya|Kompetensi SDM
pelaksana|Bagaimana
kompetensi
pelaksana?|ompetensi petugas dinilai cukup baik, baik
dalam pemahaman program maupun
kompetensi personal. Responden
menyampaikan bahwa hampir 90 persen
penyuluh keluarga berencana sudah memiliki
pendidikan strata satu dan dibekali
keterampilan yang cukup untuk menyampaikan
program kepada masyarakat.|

||Ketersediaan
anggaran|Bagaimana
dukungan
anggaran?|Dukungan anggaran sejauh ini masih cukup
baik dari pemerintah maupun pemerintah
daerah. Namun, pada tahun 2026 terdapat
efisiensi anggaran yang menyebabkan adanya
sedikit pengurangan dari anggaran yang
biasanya diterima.|

||Sarana dan
prasarana|Apakah sarana
prasarana
memadai?|Sarana dan prasarana dinilai belum 100 persen
memadai. Meskipun demikian, dukungan dari
program pusat maupun daerah sudah cukup
baik. Menurut responden, apabila sarana|

||||tersebut dapat ditambahkan, pelaksanaan
program akan menjadi lebih baik.|

|---|---|---|---|

||Informasi dan data
pendukung|Bagaimana
ketersediaan data
dan informasi?|Ketersediaan data dan informasi sudah cukup
mumpuni. Penyuluh memiliki Sistem Informasi
Keluarga (SIGA) yang memuat informasi dan
data keluarga. Selain itu, terdapat rekapan data
secara manual yang diperbarui setiap bulan dan
disinkronkan dengan data yang ada. Program
Kampung KB juga memiliki website yang
dapat diakses oleh masyarakat.|

||Kewenangan
pelaksana|Apakah
kewenangan
pelaksana sudah
jelas?|Kewenangan pelaksana sudah jelas dan
terstruktur. Instruksi pekerjaan maupun
informasi program mengalir dari tingkat pusat,
provinsi, kabupaten,

kemudian ke kecamatan
melalui balai atau UPTD. Walaupun terkadang
terdapat sedikit perbedaan atau multi-peran di
lapangan, secara umum pelaksanaan tetap dapat
dilakukan sebagaimana mestinya|

| Disposisi|Komitmen
pelaksana|Bagaimana
komitmen
pelaksana terhadap
program?|Komitmen pelaksana cukup jelas. Program
yang dijalankan berfokus pada menciptakan
keluarga yang sehat dan sejahtera. Hal tersebut
selalu digaungkan dan menjadi titik tonggak
utama dalam pelaksanaan program di lapangan.|

||Responsivitas
terhadap kebijakan|Bagaimana sikap
pelaksana ketika
menghadapi
berbagai dinamika
sosial?|Penyuluh berusaha mengoptimalkan
pemahaman terhadap perkembangan dan
dinamika masyarakat, termasuk mengikuti
perkembangan dunia teknologi dan aktif
menggunakan media sosial. Hal tersebut
dilakukan agar penyuluh dapat melihat|

||||fenomena yang berkembang di masyarakat dan
menjadikannya pertimbangan dalam
menyampaikan program serta membina
keluarga di wilayah binaan.|

|---|---|---|---|

||Integritas aparaturnya|Bagaimana bentuk
tanggung jawab
pelaksana?|Ketika terdapat permasalahan yang masih
berada dalam tugas pokok dan fungsi penyuluh
KB, penyuluh akan berusaha menangani dan
menyelesaikannya, termasuk melalui
pendampingan dan konseling. Namun, jika
permasalahan berada di luar tugas pokok dan
fungsi penyuluh KB, persoalan tersebut akan
diarahkan atau dikoordinasikan dengan pihak
yang lebih kompeten, seperti pihak keamanan,
kesehatan, maupun pihak terkait lainnya.|

||Dukungan terhadap
tujuan kebijakan|Bagaimana bentuk
inovasi pelaksanaan
program?|Inovasi dilakukan melalui pengembangan
Kampung KB sebagai wadah yang
memungkinkan berbagai sektor terlibat dalam
penyampaian program kepada masyarakat.
Pemanfaatan media sosial juga menjadi salah
satu bentuk inovasi. Selain itu, kelompok-
kelompok kegiatan dalam program ketahanan
keluarga juga menjadi bentuk inovasi yang
sudah berjalan, meskipun menurut responden
masih perlu dikembangkan lebih detail|

| Fungsi
Keagamaan|Penyuluhan agama|Program apa yang
dilakukan untuk
memperkuat fungsi
keagamaan
keluarga?|Penyuluh melakukan advokasi dan koordinasi
dengan tokoh agama maupun masyarakat.
Dalam pertemuan, penyuluh menyampaikan
program dari sisi keagamaan sekaligus
mengaitkannya dengan program kependudukan|

||||dan keluarga berencana. Fungsi agama juga
menjadi bagian dari penyampaian delapan
fungsi keluarga|

|---|---|---|---|

||Kerja sama dengan
tokoh agama|Bagaimana peran
tokoh agama?|Peran tokoh agama saat ini sudah cukup
mendukung. Menurut responden, sekitar 99
persen tokoh agama di wilayah binaannya
sudah tidak memiliki hambatan terhadap
program KB. Tokoh agama sudah memahami
pentingnya program keluarga berencana dan
mendukung pelaksanaannya di masyarakat.|

||Program
pembinaan
keluarga|Bagaimana respons
masyarakat
terhadap program
tersebut?|Respons masyarakat secara keseluruhan cukup
baik. Masyarakat dapat menerima program
tersebut dengan pola dan respons masing-

masing.|

|Fungsi Cinta
Kasih|Edukasi pola asuh|Bagaimana
program
meningkatkan
keharmonisan
keluarga?|Peningkatan keharmonisan keluarga dilakukan
melalui penyuluhan serta KIE (Komunikasi,
Informasi, dan Edukasi) mengenai delapan
fungsi keluarga, khususnya fungsi cinta kasih.
Materi yang diberikan mencakup peran suami,
istri, dan anak dalam keluarga. Selain itu,
terdapat inovasi berupa lomba keluarga
harmonis yang menjadi salah satu cara untuk
mendorong dan meningkatkan keharmonisan
keluarga.|

||Komunikasi
keluarga|Bagaimana
komunikasi
antaranggota
keluarga?|Responden mengaitkan komunikasi keluarga
dengan penggunaan alat kontrasepsi jangka
panjang. Menurutnya, keputusan menggunakan
alat kontrasepsi memerlukan komunikasi antara
suami dan istri. Karena itu, penggunaan|

||||kontrasepsi jangka panjang dipandang sebagai
salah satu indikator bahwa komunikasi antara
pasangan berjalan dengan baik.|

|---|---|---|---|

||konseling keluarga|Bagaimana
penyelesaian
konflik keluarga?|Penyelesaian konflik dilakukan sesuai dengan
jenis permasalahannya. Permasalahan yang
masih dapat ditangani oleh penyuluh akan
didampingi, sedangkan masalah di luar tugas
penyuluh akan dikoordinasikan dengan pihak
lain yang berkompeten. Untuk konflik
komunikasi, penyuluh berusaha melakukan
pendekatan dan berbicara dengan keluarga
terlebih dahulu. Jika konflik berkaitan dengan
kekerasan, penyuluh melakukan pendataan dan
berkoordinasi dengan pihak terkait seperti PPA.
Namun, responden juga mengakui bahwa tidak
semua permasalahan keluarga dapat ditangani
karena keterbatasan waktu, tenaga, dan
banyaknya keluarga binaan.|

|Fungsi
Reproduksi|Penyuluhan
kesehatan
reproduksi dan
kehidupan
berkeluarga|Bagaimana edukasi
kesehatan
reproduksi
diberikan?|Edukasi

kesehatan reproduksi diberikan
melalui pertemuan kelompok Bina Keluarga
Remaja (BKR) dan Forum Informasi dan
Konseling Remaja (PIK-R). Materinya
diberikan sejak remaja, mulai dari pemahaman
mengenai kesehatan reproduksi, kehidupan
pribadi, hubungan suami istri di masa depan,
hingga cara menjaga kesehatan reproduksi.
Penyuluh juga melibatkan tenaga kesehatan
dalam penyampaian materi kesehatan
reproduksi.|

| Fungsi
Sosialisasi dan
Pendidikan| Parenting| Bagaimana
keluarga diberikan
pendidikan
mengenai
pengasuhan?| Pendidikan pengasuhan diberikan melalui
kelompok Bina Keluarga Balita (BKB),
termasuk materi mengenai 1.000 Hari Pertama
Kehidupan (HPK). Keluarga diberikan
pemahaman mengenai pola asuh yang
mencakup aspek asih, asah, dan asuh. Selain
itu, orang tua juga diberikan pemahaman
mengenai cara menghadapi anak remaja,
khususnya ketika memasuki masa pubertas.
Orang tua diarahkan agar tidak menjadi hakim
bagi anak, tetapi menjadi mitra dan rekan bagi
anak.|

| ---| ---| ---| ---|
| | pendidikan
karakter| Bagaimana
pembentukan
karakter anak
dilakukan?| Pembentukan karakter anak dilakukan melalui
kegiatan Bina Keluarga Balita dengan
memberikan teori dan petunjuk kepada orang
tua mengenai perkembangan anak. Penyuluh
menggunakan Kartu Kembang Anak (KKA)
sebagai panduan untuk melihat perkembangan
anak berdasarkan tahapan usianya. Melalui
KKA, orang tua diberikan materi mengenai apa
yang harus dan tidak harus dilakukan dalam
mendampingi anak. Fungsi agama juga
ditekankan sebagai dasar penting dalam
pembentukan karakter anak.|

| | pembinaan remaja| Apa bentuk
kolaborasi sekolah
dan keluarga?| Kolaborasi dilakukan melalui pembentukan dan
penguatan kelompok PIK-R di sekolah.
Kelompok tersebut melibatkan siswa sebagai
pengurus dan peserta. Selain PIK-R, terdapat
pula program Sekolah Siaga Kependudukan|

| | | | | (SSK) sebagai bagian dari kampanye program
kependudukan. Responden menyampaikan
bahwa PIK-R sudah terbentuk di sejumlah
sekolah tingkat SLTP dan SLTA, dan SSK juga
sedang dikembangkan agar dapat terbentuk di
sekolah-sekolah SD, SMP, SMA dan sederajat.||

| ---| ---| ---| ---| ---| ---|
| Informan 9
(Keluarga
Sasaran) | Fungsi
Keagamaan| Penyuluhan agama| Program apa yang
dilakukan untuk
memperkuat

fungsi
keagamaan
keluarga?|Untuk memperkuat fungsi keagamaan keluarga,
keluarga berperan penting dalam menjaga dan
mengarahkan anak-anak, terutama dalam hal
pemahaman dan penerapan nilai-nilai agama.
Selain dari keluarga sendiri, anak-anak juga
diarahkan untuk mengikuti kegiatan di luar
sekolah, seperti pengajian yang diadakan oleh
pihak tertentu atau tokoh masyarakat yang di
dalamnya terdapat ustaz yang memberikan
arahan mengenai agama. Kegiatan tersebut juga
menjadi tempat untuk berkumpul, belajar
agama, bertukar pikiran dan pandangan.
Khususnya bagi remaja, kegiatan seperti ini
dapat menjadi ruang untuk berdiskusi secara
langsung mengenai berbagai hal yang mereka
hadapi.|Keluarga Bina
Keluarga
Remaja|

|||Kerja sama dengan
tokoh agama|Bagaimana peran
tokoh agama?|Peran tokoh agama di lingkungan saat ini
dirasakan masih kurang, terutama dalam
memberikan perhatian terhadap kegiatan
keagamaan bagi remaja. Kegiatan yang ada
lebih banyak ditujukan kepada masyarakat
umum. Sementara itu, kegiatan yang secara
khusus ditujukan untuk remaja masih kurang.||

||||Contohnya, belum adanya pembentukan remaja
masjid atau kegiatan seperti pengajian
berjamaah dan salat Magrib berjamaah khusus
untuk para remaja. Jadi, keterlibatan tokoh
agama di lingkungan, khususnya untuk remaja,
masih dirasakan kurang.|

|---|---|---|---|

||Program
pembinaan
keluarga|Bagaimana respons
masyarakat
terhadap program
tersebut?|Respons masyarakat terhadap kegiatan
keagamaan sebenarnya sangat baik. Masyarakat
bahkan menunggu adanya kegiatan atau
gebrakan yang ditujukan khusus untuk remaja
sesuai dengan kondisi saat ini. Orang tua
berharap adanya bantuan dari pihak keluarga
maupun tokoh agama untuk memberikan
pengarahan dalam bidang keagamaan kepada
anak-anak. Apabila ada kegiatan seperti remaja
masjid atau pengajian, masyarakat sangat
antusias dan menyambutnya dengan gembira
karena kegiatan di luar sekolah yang positif
seperti itu dinilai dapat memberikan manfaat
bagi remaja. Namun, untuk program dari
pemerintah yang secara langsung menyasar
keluarga atau remaja dalam bidang keagamaan,
saat ini masih dirasakan belum ada dan masih
kurang.|

|Fungsi Cinta
Kasih|Edukasi pola asuh|Bagaimana
program
meningkatkan
keharmonisan
keluarga?|Dalam meningkatkan keharmonisan keluarga,
kader mendapatkan pembinaan dari dinas-dinas
terkait. Pembinaan tersebut kemudian
diterapkan mulai dari keluarga terkecil, dengan
memberikan cinta kasih dan perhatian kepada|

|||anak maupun anggota keluarga. Salah satu
upaya adalah mendekatkan diri kepada
anak-anak dan mengajak mereka untuk terbuka
kepada orang tua mengenai permasalahan yang
dihadapi, baik dalam pendidikan maupun
kehidupan sehari-hari. Dalam pembinaan kader
juga diusahakan adanya waktu sekitar 30 menit
untuk makan dan berbagi cerita bersama
keluarga. Hal tersebut diterapkan khususnya
bagi orang tua yang memiliki anak remaja.
Meskipun anak-anak memiliki kesibukan,
diusahakan tetap ada waktu sekitar 30 menit
untuk makan bersama dan melakukan sharing
mengenai permasalahan yang mereka hadapi|

|---|---|---|

|komunikasi
keluarga|Bagaimana
komunikasi
antaranggota
keluarga?|Komunikasi dalam keluarga dilakukan dengan
membangun keterbukaan antara orang tua dan
anak. Orang tua berusaha mendekatkan diri
kepada anak dan memberikan kesempatan
kepada anak untuk bercerita mengenai apa
yang sedang dihadapi, baik mengenai
pendidikan, pelajaran di sekolah maupun
permasalahan lainnya. Salah satu cara yang
dilakukan adalah menyediakan waktu untuk
makan bersama dan sharing dengan keluarga.
Dengan adanya waktu tersebut, orang tua dapat
mengetahui permasalahan anak dan
membangun komunikasi yang lebih terbuka.|

||konseling keluarga|Bagaimana
penyelesaian
konflik keluarga?|Penyelesaian permasalahan dalam keluarga
lebih dilakukan melalui komunikasi dan
keterbukaan. Orang tua berusaha mendekatkan
diri kepada anak sehingga anak dapat terbuka
mengenai permasalahan yang dihadapinya.
Dengan adanya waktu untuk sharing bersama,
permasalahan yang ada dapat dibicarakan
bersama dalam keluarga|

|---|---|---|

|Fungsi
Perlindungan|perlindungan anak|Bagaimana
perlindungan
terhadap anak dan
anggota keluarga?|Perlindungan terhadap anak dilakukan oleh
orang tua dengan berusaha memberikan
perlindungan semaksimal mungkin terhadap
apa yang dibutuhkan oleh anak. Bentuk
perlindungan yang dilakukan lebih banyak
melalui nasihat dan arahan. Orang tua tidak
mungkin selalu mengikuti anak ke mana-mana,
sehingga perlindungan lebih diarahkan melalui
pemberian nasihat, pengarahan, dan
pendampingan dari pihak keluarga.|

||pendampingan
keluarga|Program apa yang
mendukung
perlindungan
keluarga?|Dalam pelatihan kader, aspek perlindungan
diarahkan untuk melindungi anggota keluarga,
khususnya anak, dan memiliki kesinambungan
dengan aspek ekonomi. Anak-anak terkadang
memiliki berbagai kebutuhan dan tuntutan dari
sekolah, sehingga keluarga perlu memberikan
arahan

sekaligus melindungi mereka agar
kebutuhan tersebut dapat terpenuhi dengan
baik.|

||Pencegahan
kekerasan|Bagaimana
penanganan apabila|Apabila terjadi permasalahan, terutama yang
berkaitan dengan anak, keluarga lebih|

|||terjadi
permasalahan
keluarga?|mengutamakan pemberian nasihat dan arahan.
Orang tua berusaha memahami kebutuhan anak
serta memberikan pendampingan sesuai dengan
permasalahan yang dihadapi. Perlindungan
dilakukan dari lingkungan keluarga dengan
cara mengarahkan dan memberikan perhatian
kepada anak.|

|---|---|---|---|

|Fungsi Ekonomi|Pemberdayaan
ekonomi keluarga|Bagaimana
pemberdayaan
ekonomi keluarga
dilakukan?|Pemberdayaan ekonomi keluarga dilakukan
melalui berbagai pelatihan peningkatan
ekonomi keluarga. Sejak tahun 2020 sudah
banyak diarahkan dalam bentuk pelatihan-
pelatihan UMKM yang bertujuan untuk
meningkatkan ketahanan dan perekonomian
keluarga. Pelatihan tersebut dilaksanakan
secara berkesinambungan, antara lain pelatihan
membuat kue, membuat buket, dan pelatihan
UMKM memasak. Untuk kader, pelatihan
peningkatan kapasitas perekonomian juga
diarahkan secara rutin, yaitu sekitar tiga bulan
sekali.|

||pelatihan usaha|Apakah ada
pelatihan usaha?|Ada. Pelatihan usaha dilakukan dalam berbagai
bentuk, seperti pelatihan membuat kue,
membuat buket bunga, dan pelatihan UMKM
memasak. Setelah mengikuti pelatihan, peserta
tidak hanya mendapatkan ilmu, tetapi juga
langsung melakukan praktik. Apabila ada biaya
untuk menjalankan usaha, hasil pelatihan
tersebut dapat langsung dikembangkan untuk
menghasilkan pendapatan. Selain itu, terdapat|

||||UMKM keluarga melalui kelompok-kelompok
UP2K dan PKK yang sudah terbentuk.||

|---|---|---|---|

|||Bagaimana manfaat
yang dirasakan
keluarga?|Pelatihan tersebut dirasakan sangat bermanfaat
karena memberikan ilmu dan keterampilan
yang dapat langsung dipraktikkan. Setelah
mengikuti pelatihan, keluarga dapat mengolah
keterampilan tersebut menjadi kegiatan yang
menghasilkan pendapatan sehingga dapat
membantu perekonomian keluarga. Bahkan,
hasil dari kegiatan tersebut sudah dirasakan
manfaatnya untuk membantu biaya sekolah
anak dan kebutuhan keluarga lainnya.
Kelompok-kelompok UMKM melalui UP2K
dan PKK juga dirasakan sangat membantu
dalam meningkatkan perekonomian keluarga.||

| Informan
10
(Tokoh
Masyarakat)
Komunikasi| Sosialisasi
program
ketahanan
keluarga| Bagaimana
Kebijakan
ketahanan
keluarga
disosialisasikan
kepada masyarakat?| Sosialisasi
Perda No. 10 Tahun 2025 secara
normatif sudah berjalan di
tingkat atas (seperti
seremonial Pemkab, rapat DPRD, atau
portal
berita resmi). Namun di tingkat akar
rumput,
sosialisasi yang menasar langsung warga
RT/RW
masih terbilang terbatas dan belum
merata. Penyampaian
informasi yang sampai
saat ini masih berupa pemahaman
umum
tentang pentingnya keharmonisan rumah
tangga, belum
menyentuh substansi teknis
Perda maupun respon mendalam
terhadap
dinamika sosial modern seperti pergeseran
nilai
atau isu LGBT| Ketua Komisi
Penanggulangan
AIDS|

| Koordinasi antar-
OPD
dan
stakeholder| Bagaimana
koordinasi
antarinstansi
dalam
pelaksanaan
kebijakan?| Secara regulasi, koordinasi
sudah diatur di
bawah dinas teknis (seperti
DP2KBP3A,
Dinsos, Kemenag) dan dikoordinasikan
oleh
Sekretariat Daerah. Namun dalam praktiknya
di
lapangan, koordinasi masih cenderung
berjalan
secara sektoral (berjalan sendiri-sendiri
per
dinas). Hal ini wajar terjadi karena kita
masih
dalam masa transisi menunggu Peraturan
Bupati
(Perbup) teknis yang menjadi panduan
operasional bersama|

| ---| ---| ---|

| Kejelasan
tujuan
kebijakan| Bagaimana
penyampaian
informasi
kepada
keluarga sasaran?| Informasi kepada keluarga sasaran
saat ini lebih
banyak dititipkan melalui program-
program
rutin yang sudah ada (_existing_), seperti
kegiatan
Posyandu, Bina
Keluarga Remaja (BKR), atau
majelis taklim.
Pendekatannya masih bersifat umum
dan
belum menggunakan instrumen khusus yang
diamanatkan
Perda, seperti_Kader Pendamping_
_Ketahanan Keluarga_yang
dibentuk secara
khusus untuk mendampingi keluarga
rentan
secara door-to-door_|
| Konsistensi
informasi| Apakah terdapat
kendala
komunikasi
dalam implementasi
kebijakan?| Tentu ada.
Kendala utamanya meliputi:
**Bahasa Regulasi vs Bahasa
Warga:**Teks
Perda cukup kompleks, sehingga jika
tidak
diterjemahkan ke dalam bahasa yang renyah|

|||| oleh tokoh masyarakat/agama, warga
sulit
memahaminya.
Filter Informasi Digital:Derasnya
informasi
instan dari media sosial sering kali lebih
cepat
mempengaruhi keluarga ketimbang sosialisasi
formal
pemerintah.
Masa Transisi Regulasi:Ketiadaan

Perbup
petunjuk teknis membuat pesan yang
disampaikan ke tingkat bawah belum memiliki
standar operasional yang sama|

|---|---|---|---|

|||Bagaimana upaya
mengatasi kendala
tersebut?|Pemerintah Daerah perlu melibatkan lembaga
keagamaan, Karang Taruna, dan tokoh
masyarakat lokal untuk mengemas pesan-pesan
Perda ini. Sosialisasi jangan hanya
mengandalkan forum kaku atau baliho,
melainkan masuk ke forum warga lokal (seperti
pengajian, kegiatan desa) serta membuat
konten literasi digital yang relevan dengan
tantangan remaja masa kini|

|Fungsi Sosial
Budaya|Pembinaan nilai
sosial|Bagaimana
pemerintah
memperkuat nilai
sosial budaya
dalam keluarga?|Pemerintah mengarahkan penguatan nilai sosial
budaya melalui norma keagamaan dan kearifan
lokal Sunda (seperti filosofi_silih asih, silih
asah, silih asuh). Secara regulasi, Perda ini
menegaskan fungsi keluarga sebagai filter
pertama agar anak dan remaja tidak kehilangan
identitas budaya serta moralitasnya di tengah
gempuran budaya luar maupun ideologi yang|

||||tidak sesuai dengan norma lokal (seperti
fenomena LGBT)|

|---|---|---|---|

||kegiatan
masyarakat|Bagaimana
partisipasi
masyaraka t?|Partisipasi masyarakat di Ciamis secara
kultural cukup tinggi. Warga aktif dalam
kegiatan kemasyarakatan, majelis taklim, dan
pengawasan lingkungan. Hanya saja, partisipasi
ini masih bersifat swadaya dan spontanitas
warga, belum terwadahi dalam sistem
pendampingan keluarga yang terorganisir
karena fasilitas dan panduan dari Pemda belum
sepenuhnya turun.|

||pelestarian budaya
lokal|Apa kendala yang
dihadapi?|Kendala terbesarnya adalah
shifting
(pergeseran) pola interaksi keluarga akibat era
digital. Banyak orang tua mengalami gagap
teknologi (_gaptek_), sehingga sulit mengawasi
anak-anaknya yang terpapar paham atau gaya
hidup baru dari internet. Selain itu, penanganan
penyimpangan sosial sering kali baru direspon
saat sudah ada kasus (_reaktif_), bukan melalui
pencegahan budaya yang terencana
(_preventif_)."|

|Fungsi
Pembinaan
Lingkungan|Kegiatan
lingkungan|Baga imana
lingkungan
mendukung
ketahanan
keluarga?|Lin gkungan di Ciamis masih memiliki kontrol
sosial berbasis kekeluargaan dan religiusitas
yang relatif kuat. Lingkungan yang aman dan
peduli antar-tetangga menjadi benteng
(_bumper_) agar anggota

keluargaâ€”khususnya
remajaâ€”tidak terjerusok ke dalam pergaulan
bebas, narkoba, maupun perilaku menyimpang. |

|partisipasi
masyarakat|Apa bentuk
partisipasi
masyarakat?|Bentuk partisipasinya berupa gotong royong,
pengaktifan kegiatan keagamaan di
masjid/mushola, kegiatan Karang Taruna, serta
kepedulian tokoh RT/RW dan Posyandu dalam
memantau kondisi sosial warga di
lingkungannya|

|---|---|---|

|pembinaan sosial|Bagaimana sinergi
pemerintah dan
masyarakat?|Sinerginya sudah ada, tetapi**perlu**
ditingkatkan dari sekadar koordinasi pasif**
menjadi kemitraan aktif**. Pemerintah
menyediakan payung hukum dan alokasi
APBD, sementara masyarakat menyediakan
ruang aksi di lapangan. Agar sinergi ini
optimal, Pemda Ciamis harus segera
mengesahkan**Perbup petunjuk pelaksanaan**
sebelum batas waktu Oktober 2026 dan
mengaktifkan**Tim Pembina Ketahanan**
Keluarga Daerah (TPK2D)**yang melibatkan
elemen tokoh masyarakat secara resmi."|

Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara



Gambar 1

Wawancara Kepala DPPKBPPPA
Ciamis



Gambar 2

Wawancara Kepala Bidang KB DPPKB
PPPA Ciamis



Gambar 3

Wawancara PJ Program Dinkes Ciamis



Gambar 4

Wawancara Kepala Seksi Bidang SD
Disdik Ciamis



Gambar 5

Wawancara Ketua MUI Kab. Ciamis



Gambar 6

Wawancara Penyuluh KB



Gambar 7

Wawancara Tokoh Masyarakat



Gambar 8

Wawancara Masyarakat



Gambar 9

Wawancara Sekretaris PKK Kabupaten Ciamis



Gambar 10

Wawancara Perwakilan Dinsos Ciamis

(Foto dokumentasi hilang tetapi dibuktikan obrolan chat)